

DAMPAK PENERAPAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TERHADAP KEBIJAKAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI

Hetty Hassanah¹; Sahat Maruli Tua Situmeang²; Musa Darwin Pane³; Wahyudi⁴;
Febilita Wulan Sari⁵

Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia
Jln. Dipatiukur No. 102 – 116 Bandung
E-mail : hetty.hassanah@email.unikom.ac.id (Koresponding)

Abstract: This study aims to find the impact of the implementation of the Independent Campus, Freedom to Learn programme on academic policies in higher education, especially the Faculty of Law, Indonesian Computer University so that this programme can be implemented more optimally in the future. The study conducted by the author is descriptive analytical with a normative juridical approach. The resulting data is analyzed in a qualitative juridical manner so that the hierarchy of laws and regulations can be considered and can guarantee legal certainty. Based on the results of the study, it can be seen that the Independent Campus, Freedom to Learn programme organized by the Unikom Faculty of Law has met the expectations of both the institution and its partners, although there are still shortcomings in its implementation practice, including internal policy alignment. The increasing competence of students participating in the Independent Campus, Freedom to Learn programme is a factor that needs to be followed up by the program, as well as the need to expand collaboration with various parties/partners to provide wider opportunities for students. The Independent Campus, Freedom to Learn programme at the Faculty of Law, Unikom, still has obstacles, namely related to the addition of new partners, curriculum adjustments and adjustments to the Academic Information System that accommodates the Independent Campus, Freedom to Learn programme. This research is a media for searching for problems, analyzes and solutions needed in the implementation of the Independent Campus, Freedom to Learn programme at the UNIKOM Faculty of Law, so that appropriate solutions can be found for these problems, especially related to internal policies within the UNIKOM Faculty of Law relating to with the implementation of the Independent Campus, Freedom to Learn programme.

Keywords: *The Independent Campus, Freedom to Learn programme, impact, policies*

Tantangan dunia pendidikan saat ini diantaranya harus mampu berinovasi dan melahirkan sumber daya manusia unggul. Jenjang pendidikan yang merupakan ujung tombak membangun sumber daya unggul yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus memiliki gerak inovasi tercepat dibandingkan semua jenjang pendidikan yang lainnya, karena keberadaan perguruan tinggi yang begitu dekat dengan dunia pekerjaan. Dengan demikian, tuntutan untuk mengembangkan kreativitas, kolaborasi dan inovasi dalam dunia perguruan tinggi menjadi suatu keharusan, baik inovasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, inovasi dalam riset dan inovasi dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Pendidikan yang menghendaki adanya perubahan praktik

pendidikan ke arah yang lebih maju, berkualitas dan modern secara cepat serta memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik dalam menghadapi persoalan kehidupan di masa yang akan datang sesuai perkembangan zaman (Mustaghfiroh, 2020). Komponen pendidikan menjadi satu kesatuan yang harus saling berkontribusi dan harus saling mendorong atau membantu, karena bagaimanapun tugas pendidikan adalah bagian dari pengaplikasian fungsi sosial (Hendri, 2020). Pendidikan harus mampu mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif, sehingga dapat menemukan hal-hal baru dan mampu menghasilkan lulusan dengan memiliki jiwa entrepreneurship yang mampu mengelola negara dan segenap potensinya (Aiman Faiz, 2020).

Upaya untuk menjawab tuntutan tersebut yaitu dengan adanya Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (selanjutnya ditulis MBKM) yang merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Program merdeka belajar tersebut untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter dengan tujuan menciptakan peserta didik yang kritis, kreatif, kolaboratif dan terampil (Aan Widiyono, Saidatul Irfana, 2021).

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan terobosan melalui berbagai program untuk menjawab tantangan pendidikan dalam situasi pandemi covid 19 dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi menjadi katalisator penting dalam pembelajaran (Anang Fathoni, Ali Mustadi, 2021). Teknologi tersebut diharapkan membantu segala elemen pendidikan dari pendidikan dasar, menengah atas dan tingkat perguruan tinggi yang dapat memudahkan proses belajar mengajar yang tidak memberatkan semua pihak terutama mahasiswa yang menjalankan perkuliahan secara daring. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka jalan bagi munculnya metodologi pengajaran dan pembelajaran baru (Hoerunnisa, A., Suryani, N., & Efendi, 2019).

Perkuliahan secara daring menjadi salah satu solusi dalam mencegah penyebaran covid 19 yang diberikan kebebasan kepada pendidik untuk memodifikasi sistem pembelajarannya. Dalam beberapa kesempatan pendidik seringkali memberikan penugasan kepada mahasiswa melalui sistem perkuliahan daring tersebut. Pemberian penugasan yang berlebihan dalam pembelajaran daring (Kusnayat, A., Muiz, M. hifzul, Sumarni, N., Mansyur, A. salim, & Zaqiah, 2020) juga tidak akan efektif, oleh karena itu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan alternatif pembelajaran yang efektif dengan tujuan memberikan kemampuan tambahan bagi

mahasiswa. Merdeka belajar berisi beberapa keputusan kebijakan pendidikan yang menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi pendidikan yang dianggap belum ideal bagi terseleggaranya pendidikan di Indonesia (Dimas Aldi Pangestu, 2021). Pembangunan pendidikan di Indonesia dalam era revolusi industri 4.0 mengharuskan mengikuti perkembangan teknologi dan mengadaptasi perubahan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai jati diri bangsa. Pembangunan pendidikan merdeka belajar dalam telaah metode pembelajaran melalui sistem dan pengajarannya harus memenuhi kecenderungan dalam pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 (Muhammad Yamin, 2020).

Era teknologi Revolusi Industri 4.0 dalam situasi pandemi covid 19 di Indonesia membuat program merdeka belajar menjadi solusi dalam kondisi darurat kesehatan sekarang ini. implementasi kebijakan Merdeka Belajar di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui penguatan proses pembelajaran berbasis teknologi yang telah dimiliki sekolah. Penguatan pertama dilakukan melalui peneguhan kurikulum internal sekolah dengan mengacu pada kebijakan Merdeka Belajar dan pelaksanaan protokol upaya pencegahan COVID-19 di lembaga pendidikan (Dina Mardiana, 2020). Pengimplementasian kebijakan merdeka belajar dapat dilakukan dengan belalui meningkatkan mutu pendidikan, proses pembelajaran, komitmen dari guru, dukungan dari kepala sekolah, dan kurikulum pendidikan (Sari, 2019). Implementasi kurikulum MBKM untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (*Outcome Based Education*) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu (Deni Sopiansyah, Siti Masruroh, Qiqi Yulianti Zaqiah, 2021).

Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat mempunyai peran dalam meningkatkan standar satuan

pendidikan diwilayahnya. Mengingat beberapa bulan terakhir, Pendidikan telah memasuki paradigma baru di masa pandemi COVID19, maka pemerintah menempuh kebijakan yang menetapkan merdeka belajar menjadi era baru dalam dunia pendidikan (Ammas, 2021). Konsep merdeka belajar menjadi suatu isu yang ramai didiskusikan didunia pendidikan, konsep yang menyuarakan adanya kemerdekaan dalam belajar ini dilakukan dalam upaya mempersiapkan mahasiswa lulusan perguruan tinggi baik negeri atau swasta agar dapat menghadapi perkembangan zaman serta perubahan yang terjadi begitu cepat (Tuti Marjan Fuadi, 2021).

Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Semua perguruan tinggi di Indonesia berusaha mengimplementasikannya sesegera mungkin, setelah adanya sosialisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adanya pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentu saja sangat mempengaruhi berbagai kebijakan akademik di tingkat program studi, fakultas maupun universitas, seperti kurikulum, sistem perwalian, sistem perkuliahan, metode pembelajaran dan sebagainya. Pelaksanaan program MBKM ini telah menimbulkan berbagai dampak, baik secara positif dan negatif. Dampak positif tentu saja menjadi motivasi dan nilai tambah yang sangat baik bagi para pihak yang melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) justru memberikan potensi besar menjadi katalis dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Dosen dan mahasiswa menjadi actor dalam pembelajaran secara mandiri dengan bantuan teknologi informasi (Endang Kartini, Lalu mimbar, 2021). Namun demikian dampak negatif pun timbul karena berbagai faktor dan tidak sedikit menjadi masalah di lingkungan akademik. Dampak yang muncul didunia pendidikan menjadi tantangan dan adaptasi baru bagi pendidik (Dewi, 2020). Kebijakan

merdeka belajar ini sangatlah baik, namun demikian dasar-dasar historis dan filosofisnya belum membumi. Akibatnya, kebijakan merdeka belajar belum sepenuhnya mampu memotivasi penyelenggara pendidikan untuk mengimplementasikannya (Jamiluddin, 2020). Merdeka belajar yang diterapkan beberapa perguruan tinggi sangat beragam dan disesuaikan dengan visi misi perguruan tingginya, salah satunya dengan metode *mobile learning*. Kemerdekaan belajar yang ditawarkan melalui mobile learning belum sepenuhnya membuat mahasiswa merdeka dalam belajar (Arif Widodo, 2020).

Dampak yang timbul dalam penerapan program MBKM terhadap kebijakan akademik inilah yang dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh gambaran jelas optimalisasi program tersebut di lingkungan Fakultas Hukum Unikom.

Pada saat ini, terdapat penelitian yang terkait dengan program MBKM, diantaranya yaitu penelitian dari Agil Nanggala dan Karim Suryadi yang berjudul “Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis konsep kampus merdeka dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, khususnya pada dimensi kurikuler dan sosio-kultural (Suryadi, 2020). Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arifin dan Moh. Muslim yang berjudul “Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. Penelitian tersebut disusun untuk untuk melihat bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik dalam Kurikulum Merdeka Belajar serta tantangan implementasi kurikulum tersebut pada Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia (Muslim, 2020).

Penelitian-penelitian yang terdahulu terkait MBKM tersebut memiliki tujuan penelitian yang berbeda dengan tujuan penelitian yang dikaji penulis. Posisi

penelitian penulis di antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu untuk memperkaya khasanah kajian penelitian terkait MBKM yang sudah ada sebelumnya. Penerapan program MBKM di setiap perguruan tinggi tentu mengalami berbagai tantangan dan penyesuaian kebijakan akademik.

Hal inilah yang akan menjadi fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, terutama bagaimana dampaknya terhadap kebijakan akademik di lingkungan Fakultas Hukum Unikom. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terkait program MBKM khususnya bagi pengambilan kebijakan internal di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia. Mengingat melalui program MBKM yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

METODE

Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan fakta-fakta secara sistematis disertai analisis tentang dampak penerapan program MBKM terhadap kebijakan akademik di perguruan tinggi, juga menganalisis data sekunder bahan hukum primer tentang dampak penerapan program MBKM terhadap kebijakan akademik perguruan tinggi. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli (doktrin) tentang program MBKM seperti karya ilmiah para pakar hukum, serta data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya untuk menunjang data penelitian. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dalam

hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan dampak penerapan program MBKM terhadap kebijakan akademik di perguruan tinggi, pada tahap ini dilakukan penelitian sejarah hukum tentang pengaturan program merdeka belajar kampus merdeka dalam sistem pendidikan tinggi, juga beberapa penafsiran hukum antara lain penafsiran hukum sistematis dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan perundang-undangan lainnya, dalam kaitannya dengan penerapan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) di perguruan tinggi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi terkait. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-undangan yang satu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta tercapainya kepastian hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Bandung.

HASIL

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan pembaharuan dalam kebijakan pendidikan tinggi. Secara normatif, kebijakan kampus merdeka memiliki tujuan untuk mengatasi kompleksnya kebutuhan serta tantangan zaman pada era modern ini. Hal ini merupakan bentuk aktual dalam kebijakan pendidikan tinggi, guna mengoptimalkan eksistensi dari perguruan tinggi, sehingga kesenjangan pendidikan tinggi, khususnya pada aspek kualitas serta pemerataannya bisa terselesaikan (Suryadi, 2020).

Kebijakan MBKM secara yuridis formil berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan demikian Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan cita-cita, kemauan dan kemampuannya. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki daya inovasi, dan dapat berkolaborasi (Syahrir, 2020).

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 sudah ikut serta dalam program MBKM. Pada semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 ini terdapat 4 (empat) orang mahasiswa yang lolos seleksi dan diterima untuk mengikuti beberapa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan ini merupakan awal yang cukup baik dalam mengimplementasikan program tersebut.

Implementasi pelaksanaan program MBKM Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, meliputi :

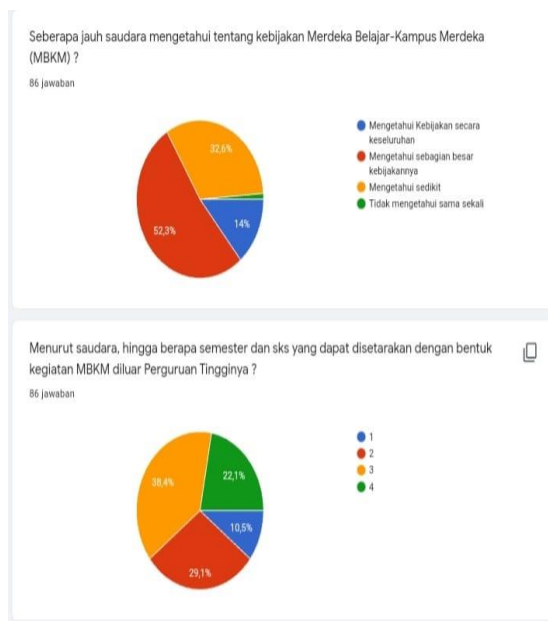
- a. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. Bentuk pembelajaran ini dapat memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud. Ada 1 (satu) orang mahasiswa Fakultas Hukum UNIKOM yang lolos untuk mengikuti program ini.
- b. Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI). KMMI merupakan program pelengkap pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja dan industri yang mendukung implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Program KMMI sebagai aktualisasi dan referensi materi yang digunakan dalam dunia kerja dan Industri. memberikan tambahan keterampilan kepada mahasiswa calon lulusan perguruan tinggi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan melaksanakan program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI). Ada 2 (dua) orang mahasiswa Fakultas Hukum UNIKOM yang mengikuti program KMMI ini.
- c. Program Magang yang dilaksanakan selama 1-2 semester. Program magang ini dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal dari perusahaan atau instansi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih profesional dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan

nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Ada 1 (satu) orang mahasiswa Fakultas Hukum UNIKOM yang lolos mengikuti program magang ini.

Melalui kebijakan Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ingin agar universitas di Indonesia diberi ruang yang cukup memadai untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman (Suteja, 2021).

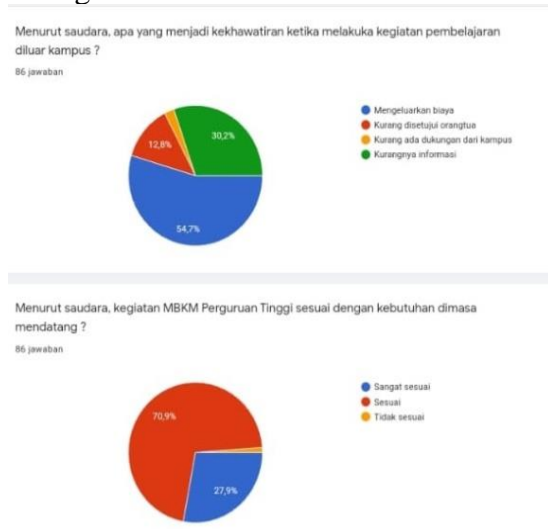
Penelitian ini berfungsi menjadi media penelusuran masalah, analisis serta solusi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Fakultas Hukum UNIKOM, sehingga dapat dicari solusi yang tepat atas masalah tersebut terutama berkaitan dengan kebijakan internal di lingkungan Fakultas Hukum UNIKOM yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBKM tersebut. Sebagai upaya menunjang data penelitian dan analisis, penulis mengkaji pula survey mengenai dampak pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Fakultas Hukum UNIKOM, terutama yang berkaitan dengan kebijakan internal di Fakultas Hukum UNIKOM. Survey dilakukan pada 14-20 Desember 2021 dengan tujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan program MBKM di Fakultas Hukum Unikom. Pada pelaksanaannya, survey tersebut dilakukan terhadap seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Unikom diantaranya yaitu mahasiswa, Dosen dan Tenaga Pendidik serta mitra pelaksana program MBKM yaitu Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI), Universitas Fajar, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Kuningan, Universitas Syiah Kuala, Universitas Udayana, Universitas Indonesia, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Universitas Kristen Indonesia Paulus.

Berikut sebagian diagram yang dihimpun berdasarkan hasil survey terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Unikom :



Gambar 1. Diagram Survey Mahasiswa terkait informasi dan pemahaman mengenai kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)

Gambar 1. menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Informasi dan pemahaman terkait program MBKM diperoleh mahasiswa melalui sosialisasi dan media informasi daring.



Gambar 2. Diagram Survey Mahasiswa terkait keikutsertaan dalam Program MBKM

Gambar 2 menunjukkan bahwa sekitar 98 % mahasiswa tertarik untuk mengikuti program MBKM akan tetapi terdapat 54,9 % mahasiswa mengkhawatirkan terkait biaya program

tersebut. Kemudian sekitar 84,9% responden mahasiswa memberikan pendapat bahwa program MBKM dapat menambah kompetensi sesuai kebutuhan.

Survey dilakukan juga kepada pihak mitra program MBKM Fakultas Hukum Unikom, sebagian besar mitra memberikan gambaran bahwa ke depannya ingin memperpanjang bentuk kerjasama program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan Fakultas Hukum Unikom. Responden mitra menyatakan 99% program MBKM sesuai dengan harapan dan berkeinginan untuk memperpanjang kerjasama dengan FH Unikom. Selanjutnya responden Dosen memberikan persentasi sebanyak 98% mengetahui program MBKM dari sosialisasi secara luring/daring yang diselenggarakan oleh kampus dan seluruhnya bersedia untuk menjadi pembimbing program MBKM. Kemudian sebanyak 94% responden dosen mengalami kendala terkait penjajagan mitra, penyesuaian kurikulum dan penyesuaian Sistem Informasi Akademik.

Adanya penelitian ini, memberi pula dampak terhadap faktor ekonomi dan sosial bagi para pihak yang terlibat. Dampak secara ekonomis dari penelitian ini, dapat memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) agar menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga mahasiswa lebih termotivasi untuk turut melaksanakannya dan memperoleh peningkatan dalam pemahaman bidang ilmu nya dan ilmu lainnya, kemampuan, skill, serta kompetensi yang dapat bermanfaat bagi kepentingannya di masa depan khususnya dalam menjalankan profesinya yang tentu saja akan berdampak pada peningkatan perekonomian baik secara pribadi maupun kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu beberapa program MBKM yang dilaksanakan berhubungan dengan masyarakat desa atau instansi lain, ini juga akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan perekonomian. Selanjutnya, hasil penelitian ini juga memberi masukan dan arahan bagi Fakultas Hukum UNIKOM dalam membuat

kebijakan terkait pelaksanaan program MBKM yang menguntungkan mahasiswa serta Fakultas Hukum UNIKOM, seperti perubahan kurikulum, sistem perwalian, metode pembelajaran dan sebagainya, sehingga dapat meningkatkan kualitas Fakultas Hukum dan hal ini menjadi salah satu kelebihan yang dapat dipromosikan kepada masyarakat.

Sementara itu dari aspek sosial hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terkait sikap yang harus diambil baik oleh pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pihak perguruan tinggi, termasuk di dalamnya Fakultas Hukum UNIKOM dan seluruh sivitas akademiknya, dalam pelaksanaan program MBKM yang bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya. Pada pelaksanaan program MBKM ini juga para mahasiswa memperluas jejaring sosial atau *network*, karena para mahasiswa tersebut tidak hanya beraktivitas dan bersosialisasi di lingkungan kampusnya saja, tetapi juga di universitas dan atau instansi dan lingkungan yang lain.

Hasil penelitian tentang survey dampak pelaksanaan program MBKM terhadap kebijakan di Fakultas Hukum UNIKOM, dapat memberikan kontribusi pada sektor lain, yaitu :

- a. Sektor Pendidikan, dalam hal ini hasil penelitian dapat memberikan gambaran, arahan dan petunjuk terkait kebijakan internal Fakultas Hukum UNIKOM khususnya, dan umumnya semua pihak perguruan tinggi terkait dalam membuat kebijakan terkait pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- b. Sektor Hukum, dalam hal ini kaitannya dengan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) haruslah menjamin kepastian hukum dan mencerminkan keadilan bagi para pihak dalam masyarakat. Ketentuan

hukum yang dibuat diharapkan tidak tumpang tindih sehingga akan menyulitkan berbagai pihak dalam mentaatinya. Di samping itu pemerintah harus selalu segera membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang sebagai pedoman teknis agar tidak menimbulkan multi penafsiran terhadap ketentuan undang-undangnya.

- c. Sektor Budaya, hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan berbagai bentuk kegiatan dari satu daerah ke daerah lain yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen ini, akan memberi dampak positif dalam upaya saling mengenal budaya daerah yang beraneka ragam di seluruh wilayah Indonesia.
- d. Sektor Dunia kerja, adanya pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa yang berpartisipasi dalam program tersebut, yakni menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, skill/keahlian, memperluas jejaring sosial/network serta meningkatkan kompetensi para mahasiswa yang akan sangat mempengaruhi profesionalismenya dalam dunia kerja di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi di era modern. Dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester, program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, wawasan, serta kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Pelaksanaan program MBKM di Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 telah menunjukkan

langkah awal yang positif. Sebanyak empat mahasiswa berhasil lolos seleksi dan mengikuti berbagai program MBKM, termasuk pertukaran pelajar, Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), dan program magang.

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi program MBKM telah banyak membahas dampak positif dari program ini terhadap pengembangan keterampilan mahasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut penelitian (Suryadi, 2020), program MBKM diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pendidikan tinggi, khususnya dalam hal kualitas dan pemerataan. Dalam konteks UNIKOM, penelitian (Syahrir, 2020) menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam implementasi program MBKM untuk memastikan keberhasilan dan relevansi pendidikan tinggi di era global.

Selain itu, (Suteja, 2021) dalam penelitiannya menekankan pentingnya adaptasi universitas terhadap perkembangan zaman melalui kebijakan MBKM. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBKM, seperti penyesuaian kurikulum dan penajangan mitra kerja sama, yang juga tercermin dalam hasil survey di Fakultas Hukum UNIKOM.

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan program MBKM di Fakultas Hukum UNIKOM telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan mitra kerja sama. Namun, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama terkait biaya program dan penyesuaian kurikulum. Sebagai rekomendasi, UNIKOM perlu mempertimbangkan penyediaan bantuan finansial untuk mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM serta melakukan penyesuaian kurikulum secara lebih fleksibel untuk mendukung program ini.

Selain itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat kerjasama dengan mitra industri dan institusi lainnya, guna memperluas peluang magang dan program kredensial lainnya bagi mahasiswa. Dengan

demikian, program MBKM di UNIKOM dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas.

SIMPULAN

Program MBKM memiliki dampak besar terhadap kebijakan akademik di perguruan tinggi, salah satunya yaitu perlunya pedoman dan kebijakan akademik perguruan tinggi yang selaras dengan kebijakan pusat. Berdasarkan hasil survey dapat disimpulkan bahwa program MBKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unikom telah sesuai dengan harapan baik oleh institusi maupun dengan mitra, bertambahnya kompetensi mahasiswa yang mengikuti program MBKM menjadi faktor yang perlu ditindaklanjuti program tersebut. Akan tetapi program MBKM tersebut masih terdapat kendala yaitu terkait dengan penyelarasan kebijakan, penyesuaian kurikulum dan penyesuaian Sistem Informasi Akademik yang mengakomodir program MBKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Aan Widiyono, Saidatul Irfana, K. F. (2021). Implementasi Merdeka Belajar melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik*, 16(2), 102–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/md.v16i2>
- Ahmad suryadi. (2020). *Teknologi dan Media Pembelajaran Jilid I. Jawa Barat: Cv Jejak*, anggota IKAP
- Aiman Faiz, I. K. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(2), 155–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>
- Ammas, S. (2021). Pembelajaran Daring Dalam Perspektif Merdeka Belajar. *Jurnal Sipatokkong BPSDM-SULSEL*, 2(1), 35–45.
- Anang Fathoni, Ali Mustadi, W. K. (2021). Persepsi Mahasiswa PGSD Pada

Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19. *Kwangsa : Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(1), 107–123.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v9n1.p107--123>

- Arif Widodo, N. N. (2020). Merdeka belajar dalam pandemi: Persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran jarak jauh berbasis mobile. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.35747>
- Deni Sopiansyah, Siti Masruroh, Qiqi Yuliati Zaqiah, M. E. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.458>
- Dewi. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Dimas Aldi Pangestu, S. R. (2021). Filosofi Merdeka Belajar Berdasarkan Perpektif Pendiir Bangsa. *Jurnal Pendidikan & Kebudayaan*, 6(1), 78–92. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i1.1823>
- Dina Mardiana, U. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19: Studi di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. *Al-TA'DIB Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 13(2), 78–91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/atdbwv13i2.1896>
- Endang Kartini, Lalu mimbar, I. (2021). TANTANGAN DALAM PEMBELAJARAN PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASI MERDEKA

- BELAJAR DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 9(2), 43–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.321>
- Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 8(1), 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/et.v8i1.107288>
- Hoerunnisa, A., Suryani, N., & Efendi, A. (2019). The Effectiveness of the Use of E-Learning In Multimedia Classes to Improve Vocational Students' Learning Achievement and Motivation. *Kwangsa: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(2), 123. <https://doi.org/https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v7n2.p123--137>
- Jamiluddin. (2020). Merdeka Belajar Menapaki Syara' (Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Pendidikan Islam). *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan Islam*, 18(2), 249–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/alishlah.v18i2.1577>
- Kusnayat, A., Muiz, M. hifzul, Sumarni, N., Mansyur, A. salim, & Zaqiah, Q. yulianti. (2020). *Pengaruh Teknologi Pembelajaran Kuliah Online Di Era Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Mental Mahasiswa*. 1(2), 153–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1987>
- Muhammad Yamin, S. (2020). PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MERDEKA BELAJAR (TELAAH METODE PEMBELAJARAN). *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 6(1), 126–136. <https://doi.org/10.36312/jime.v6i1.1121>
- Muslim, S. A. dan M. (2020). Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al Ilmi*, 3(1), 1.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Sari, R. M. (2019). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 38–50.
- Suryadi, A. N. dan K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen*, IX(2), 10.
- Suteja, J. (2021). *Kampus Merdeka: Merdeka Belajar*. <https://www.researchgate.net>.
- Syahrir, M. Y. (2020). Pembangunan Pendidikan Merdekan Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(126).
- Tuti Marjan Fuadi, D. A. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MbkM) : Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603–614.